



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-76/PK/2024 2 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 (Pemutakhiran)

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota di Indonesia

Merujuk surat kami sebelumnya nomor S-52/PK/2024 tanggal 30 Mei 2024 hal Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 Sebagai Dasar Penyusunan KUA PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, berikut kami sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 hasil pemutakhiran.

KEM PPKF hasil pemutakhiran merupakan dokumen yang telah disesuaikan dengan pembahasan dan kesepakatan dengan DPR RI pada Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun 2025.

KEM PPKF Tahun 2025 hasil pemutakhiran memuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada Bab V tentang Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2025 dan KEM PPKF Regional pada Bab VI tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah beserta lampiran (Strategi Kebijakan Kewilayahan) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Selanjutnya, untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Contact Center DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal

